



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional
Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Pengiriman Satuan Tugas FPU Angkatan Kepolisian Republik Indonesia
untuk Operasi MINUSCA

Skripsi

Oleh

Daniel Kristanto Primawan

6091901194

Bandung

2023



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional
Program Sarjana**

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pengiriman Satuan Tugas FPU Angkatan Kepolisian Republik Indonesia
untuk Operasi MINUSCA**

Skripsi

Oleh

Daniel Kristanto Primawan
6091901194

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

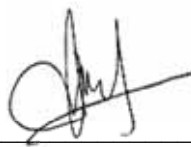
Nama : Daniel Kristanto Primawan
Nomor Pokok : 6091901194
Judul : Pengiriman Satuan Tugas FPU Angkatan Kepolisian Republik Indonesia untuk Operasi MINUSCA

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 3 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Bpk. Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

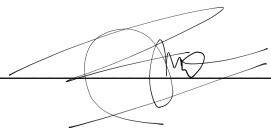
Sekretaris

Bpk. Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Anggota

Bpk. Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Daniel Kristanto Primawan
NPM : 6091901194
Jurusan/Program Studi : Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana
Judul : Pengiriman Satuan Tugas FPU Angkatan Kepolisian
Republik Indonesia untuk Operasi MINUSCA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juni 2023

Penulis,

A square QR code with a pink border. In the center of the QR code is a circular official stamp of the Indonesian National Police (Polda). The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'PETERAI' and 'FORUM MELAKUKAN'. A handwritten signature in black ink is written over the QR code and the stamp.

Daniel Kristanto Primawan

ABSTRAK

Nama : Daniel Kristanto Primawan
NPM : 6091901194
Judul : Pengiriman Satuan Tugas FPU Angkatan Kepolisian Republik Indonesia untuk Operasi MINUSCA

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pelatihan dan pengalaman penegakan hukum yang dimiliki oleh satuan tugas FPU angkatan Kepolisian Republik Indonesia merupakan alasan Indonesia tetap melakukan pengiriman satuan tugas FPU angkatan Kepolisian Republik Indonesia untuk operasi MINUSCA. Perkembangan terbaru menunjukkan konflik yang sedang berjalan di Republik Afrika Tengah sangat mengkhawatirkan masyarakat internasional, yang ditunjukkan dengan banyaknya laporan pelanggaran HAM dan perselisihan antara kelompok bersenjata dan pemerintah Republik Afrika Tengah. Dengan konflik yang bereskalasi dan tidak stabil, Indonesia tetap mengirimkan angkatan kepolisian untuk membantu operasi MINUSCA dalam menyelesaikan mandatnya. Dengan konsep *Capability-Based Planning*, dapat dibuktikan bahwa keputusan Indonesia untuk tetap mengirimkan satuan tugas FPU angkatan Kepolisian Republik Indonesia, disebabkan oleh Indonesia yang memiliki kapabilitas angkatan satuan tugas FPU, dan memenuhi kriteria dari mandat UNPOL untuk operasi MINUSCA.

Kata Kunci: MINUSCA, FPU, angkatan Kepolisian Republik Indonesia, *Capability-Based Planning*

ABSTRACT

Nama : Daniel Kristanto Primawan

NPM 6091901194

Judul : Dispatch of Indonesian Police Force FPU Task Force for MINUSCA Operation

This research aims to prove that the training and law enforcement experience possessed by the Indonesian National Police Force FPU task force is the reason Indonesia continues to send the Indonesian National Police Force FPU task force for MINUSCA operations. Recent developments show that the ongoing conflict in the Central African Republic is of great concern to the international community, as indicated by the many reports of human rights violations and disputes between armed groups and the government of the Central African Republic. With the conflict escalating and unstable, Indonesia continues to send police forces to assist the MINUSCA operation in completing its mandate. With the concept of Capability-Based Planning, it can be proven that Indonesia's decision to keep sending the FPU task force of the Indonesian National Police force, is due to Indonesia having the capability of the FPU task force, and meeting the criteria of the UNPOL mandate for the MINUSCA operation.

Keywords: MINUSCA, FPU, Indonesian National Police force, Capability-Based Planning

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini ditulis untuk menganalisis peran yang dimiliki oleh satuan tugas FPU sebagai alasan pengiriman angkatan Kepolisian Republik Indonesia untuk operasi MINUSCA. Analisis dalam skripsi ini akan menggunakan konsep *Capability-Based Planning* yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan kapabilitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi akademis terhadap perkembangan analisis terkait angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam operasi perdamaian PBB. Terlepas dari segala upaya yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan batasan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima setiap kritik, saran, dan masukan yang konstruktif untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Bandung, 16 Juni 2023



Daniel Kristanto Primawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
ABSTRACT.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	5
1.2.3 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Kajian Literatur.....	6
1.5 Kerangka Pemikiran.....	10
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB 2.....	18
Konflik, MINUSCA, dan FPU Kepolisian Republik Indonesia.....	18
2.1 Konflik Republik Afrika Tengah.....	18
2.2 Operasi MINUSCA.....	21
2.3 UNPOL.....	26
2.4 Angkatan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Operasi MINUSCA.....	29
2.3.1 FPU dan IPO.....	31
2.3.2 FPU Indonesia dalam MINUSCA.....	33
BAB 3.....	37
Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Pasukan Perdamaian Dalam Operasi MINUSCA	37
3.1 MINUSCA dalam Operasi Perdamaian Internasional Kontemporer.....	37
3.1.1 Tradisional Police Peacekeeping.....	37
3.1.2 Transformational Police Peacekeeping.....	38
3.1.3 Interim Law Enforcement.....	41
3.2 Kapabilitas Penegakan Hukum Satuan Tugas FPU Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.....	42
3.2.1 Pelatihan Satuan Tugas FPU Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.....	43
3.2.2 Pengalaman Satuan Tugas FPU Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.....	45

BAB 4.....	47
KESIMPULAN.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kontribusi negara dalam mengirimkan angkatan kepolisian negara unit FPU (31 Maret 2023).....	22
Gambar 2.2 Peringkat negara berdasarkan kontribusi pengiriman pasukan perdamain (31 Maret 2023).....	28
Gambar 2.3 Kontribusi Indonesia mengirimkan FPU dalam operasi MINUSCA (31 Maret 2023).....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

MINUSCA, *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic*, adalah misi stabilisasi terpadu multidimensi untuk Republik Afrika Tengah. Dewan keamanan PBB membentuk misi menjaga perdamaian ini pada tahun 2014, untuk Republik Afrika Tengah yang terus mengalami konflik yang berhubungan dengan ketidakstabilan keamanan serta pada bidang-bidang negara lainnya.¹ Kondisi di Republik Afrika Tengah memang sudah tidak aman sejak tahun 2012, dimana kelompok suku bersenjata sudah mulai melakukan aksi kekerasan terhadap pemerintah dan juga kelompok suku lainnya.

Situasi di Republik Afrika Tengah semakin hari terus menjadi rumit dan berbahaya. Hal ini ditunjukkan oleh ketidakstabilan yang berkepanjangan, relokasi masyarakat sipil yang meluas, dan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan. Wilayah berkonflik tetap menjadi perhatian yang signifikan bagi masyarakat internasional, dan upaya yang berkesinambungan diperlukan untuk meningkatkan stabilitas, keamanan, serta pembangunan dalam Republik Afrika Tengah. PBB telah memantau perkembangan situasi yang terjadi di Republik Afrika Tengah dan juga menerbitkan analisis serta laporan yang mendalam mengenai yang sedang terjadi di sana.²

Menurut laporan terkini yang dikeluarkan oleh sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Februari 2023, kelompok bersenjata terlihat lebih aktif di banyak bagian Republik Afrika Tengah, seperti pada kawasan Carnot, Mambéré-Kadéï,

¹ United Nations Peacekeeping, "MINUSCA," United Nations Peacekeeping, 2014, <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusca>.

² Better World Campaign, "CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (MINUSCA)," Better World Campaign, December 13, 2021, <https://betterworldcampaign.org/mission/central-african-republic-minusca>.

Bossangoa, Ouham, dan Ndélé.³ Meskipun ada upaya pemerintah untuk menggalang perdamaian dan persatuan, kelompok-kelompok ini terlihat sangat terlibat dalam pertempuran kontak senjata terhadap kelompok suku lainnya. Tidak hanya dengan kelompok lain dalam negara mereka sendiri, tetapi juga dengan kekuatan keamanan negara dan internasional. Kontak senjata inilah yang membuat konflik menjadi lebih intens dan menyebabkan banyaknya korban jiwa dari masa sebelum-sebelumnya.

Menurut penilaian terkini dari PBB, insiden pelanggaran hak asasi manusia juga masih berlangsung. Hal ini mencakup perekrutan anak muda dengan paksa ke dalam kelompok-kelompok bersenjata, pelecehan seksual, dan menewaskan masyarakat sipil.⁴ Laporan juga menyatakan bahwa situasi keamanan di beberapa daerah telah memburuk. Seriusnya situasi konflik pada saat ini membuat organisasi-organisasi internasional dan nasional kesusahan dalam membantu untuk menyediakan kebutuhan yang penting dan membantu individu-individu yang membutuhkan.⁵

Melihat situasi yang telah dilaporkan oleh sekretaris jenderal PBB, terlihat permasalahan yang sedang berjalan mengarah kepada konflik bersenjata yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Dampak konflik pada tahun 2013 dan 2014 saja diestimasi telah memakan korban sebanyak 3.000 sampai dengan 6.000 dan pada bulan juni 2021, sebanyak lebih dari satu juta masyarakat sipil perlu meninggalkan tempat tinggalnya dan juga mencari tempat perlindungan di negara tetangga.⁶ Dengan konflik ini sebagai permasalahan terbesar yang perlu ditanggapi oleh Republik Afrika Tengah serta PBB, sudah sepantasnya untuk aktor penegak

³ UN Secretary-General, "Central African Republic : Report of the Secretary-General," United Nations Digital Library (New York: United Nations, 2023), <https://digitallibrary.un.org/record/4003714?ln=en>.

⁴ Ibid.

⁵ Better World Campaign, loc. cit.

⁶ The United States Holocaust Memorial Museum, "Political and Ethnic Violence in Central African Republic," [www.ushmm.org](https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/central-african-republic/case-study/background/political-and-ethnic-violence#:~:text=Although%20it%20is%20difficult%20to), August 2021, <https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/central-african-republic/case-study/background/political-and-ethnic-violence#:~:text=Although%20it%20is%20difficult%20to>.

perdamaian mengirimkan pasukan perdamaian agar konflik bersenjata dapat ditanggapi dengan efisien.

Operasi ini didukung oleh pendekatan multidimensional mencakup aksi gabungan antara angkatan militer, angkatan kepolisian, dan organisasi sipil. Dalam mandat yang dimiliki oleh MINUSCA, pasukan perdamaian akan terdiri dari 10.000 personel militer dan 1.800 personel polisi.⁷ Strategi yang terkoordinasi ini telah dikembangkan untuk mengatasi isu-isu kompleks yang muncul dalam Republik Afrika Tengah. Pengiriman pasukan perdamaian dalam misi ini dilakukan untuk mendukung pemulihan perdamaian, melindungi masyarakat sipil, membantu penyaluran donasi, dan mempromosikan hak-hak kemanusiaan yang fundamental bagi masyarakat sipil dalam Republik Afrika Tengah.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, Indonesia turut mengirimkan angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pasukan perdamaian dalam operasi MINUSCA. Pengiriman angkatan Kepolisian Republik Indonesia disertai angkatan militer Indonesia yang juga mengambil peran dalam mendorong proses stabilisasi dan perdamaian Republik Afrika Tengah. Dikirimnya angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam operasi MINUSCA dianggap sebagai bentuk pernyataan bahwa Indonesia mendukung proses perdamaian yang dijalani oleh PBB. Indonesia juga menunjukkan bahwa negara telah siap dalam menjawab panggilan dalam kebutuhan internasional.

Sebagai negara yang ikut dalam memelihara perdamaian dunia, Indonesia telah memberikan contoh sebagai aktor internasional yang mendukung adanya penegakan hukum dan

⁷ United Nations Peacekeeping, "About MINUSCA," MINUSCA, April 22, 2015, <https://minusca.unmissions.org/en/about>.

juga perdamaian. Indonesia tergabung dalam operasi MINUSCA. Bergabungnya Indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian angkatan kepolisian untuk MINUSCA dapat dilihat sejak bulan Mei 2019.⁸ Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan anggotanya untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (MPP PBB). Hingga pada saat ini, tercatat sejumlah 700 personel Kepolisian Republik Indonesia yang telah ditugaskan dan juga menyelesaikan masa tugasnya di berbagai MPP PBB termasuk Republik Afrika Tengah.⁹

Indonesia secara konsisten telah berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB dalam banyak kesempatan. Hal ini tidak terkecuali dalam kawasan-kawasan yang memiliki tingkat konflik yang sangat tinggi dan perdamaian sangat dibutuhkan. Dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke dalam misi stabilisasi multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA), Indonesia telah menunjukkan komitmen mereka untuk ikut mengambil bagian dalam inisiatif internasional yang mengedepankan perdamaian, keamanan, dan perlindungan warga sipil.

Dalam MINUSCA, Indonesia sendiri telah memberikan kontribusinya, bukan hanya dengan mengirimkan angkatan militer, namun juga dengan mengirimkan angkatan kepolisian sebagai pasukan perdamaian dunia yang termasuk dalam UNPOL atau *United Nations Police*. Pengiriman angkatan polisi Indonesia sebagai pasukan perdamaian UNPOL merupakan hal yang dibanggakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari apresiasi yang diberikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat mengirimkan pasukan perdamaian pada bulan September 2022 silam. Partisipasi Indonesia dalam mengirimkan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai pasukan perdamaian UNPOL dianggap menunjukkan

⁸Purnomo Sucipto and Indrita Hardiani, "Kiprah Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, September 15, 2021, <https://setkab.go.id/kiprah-indonesia-pada-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb/>.

⁹ Ibid.

peran aktif Kepolisian Republik Indonesia dalam memperjuangkan penegakan perdamaian dalam lingkungan internasional.¹⁰

Indonesia telah memberikan kontribusinya secara signifikan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB sepanjang sejarahnya. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam membantu upaya menjaga perdamaian global. Menurut data, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengiriman pasukan perdamaian terbanyak untuk MINUSCA. Secara detail, Indonesia memiliki 226 personel militer dan 140 personel polisi yang pada saat ini sedang menjalankan tugasnya di Republik Afrika Tengah.¹¹ Dengan kontribusi pengiriman anggota kepolisian sebagai pasukan perdamaian UNPOL untuk MINUSCA, membuat Indonesia termasuk dalam kontributor penjaga perdamaian terbanyak untuk kategori angkatan polisi.¹²

1.2.2 Pembatasan Masalah

Campur tangan PBB dengan operasi MINUSCA dimulai sejak 2014 hingga pada saat ini. Namun pengiriman angkatan kepolisian untuk operasi tersebut baru dimulai sejak tahun 2019 dan penulis akan melihat kasus sampai dengan pengiriman FPU 4. Aktor-aktor internasional yang terlibat dalam usaha penegakan perdamaian ini mencakup organisasi internasional PBB serta negara-negara yang telah memberikan kontribusinya seperti Rwanda, Senegal, Kamerun, Mauritania, Kongo, Indonesia, dan masih banyak lagi. Pada penelitian ini, akan memfokuskan pada aktor negara Indonesia serta unit angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam bentuk FPU yang telah dikirimkan sebagai upaya memenuhi kewajiban menjaga perdamaian dunia.

¹⁰ Laily Rahmawaty, "Polri Berangkatkan 140 Personel Garuda Dalam Misi Perdamaian Di Bangui Afrika Tengah," ed. Hernawan Wahyudono, Antara News Sultra, September 2022, <https://sultra.antaranews.com/berita/427421/polri-berangkatkan-140-personel-garuda-dalam-misi-perdamaian-di-ban-gui-afrika-tengah>.

¹¹ Ibid.

¹² United Nations Peacekeeping. Loc. Cit.

1.2.3 Rumusan Masalah

Untuk memahami peran yang dimiliki oleh angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pasukan perdamaian UNPOL untuk MINUSCA, penulis akan berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian: **Mengapa Indonesia perlu mengirimkan satuan tugas FPU angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pasukan perdamaian, dalam operasi MINUSCA?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan peran yang dijalankan oleh angkatan kepolisian Republik Indonesia dalam operasi MINUSCA merupakan alasan dalam dilakukannya pengiriman pasukan perdamaian disaat konflik yang sedang terjadi dalam Republik Afrika Tengah menunjukkan tetap bereskalasi dan tidak stabil. Argumen yang akan dihasilkan akan mengarah kepada pentingnya peran yang dimainkan oleh angkatan Kepolisian Republik Indonesia di dalam konflik bersenjata dan tindakan agresi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan dan menjelaskan informasi terkait kegiatan serta peran yang telah dilakukan oleh pasukan perdamaian angkatan polisi Indonesia selama beberapa tahun kebelakang. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca untuk dijadikan suatu referensi terkait pembahasan topik peran pasukan perdamaian kepolisian negara dalam operasi perdamaian PBB.

1.4 Kajian Literatur

Untuk membantu dalam menjelaskan mengenai alasan pengiriman angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam operasi MINUSCA, penulis akan melihat peran apa saja yang dimiliki

oleh angkatan polisi dalam operasi perdamaian. Penulis akan menggunakan empat literatur yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, akan berisikan dua literatur yang membahas mengenai *community policing* sebagai fokus utama angkatan kepolisian dalam operasi perdamaian. Kelompok kedua, akan membahas mengenai angkatan kepolisian dalam operasi perdamaian yang perannya multidimensional dan akan bergantung pada tipe dari operasi tersebut.

Literatur pertama merupakan buku berjudul “**Community Policing and Peacekeeping (Advances in Police Theory and Practice)**” ditulis oleh Peter Grabosky mengungkapkan bahwa angkatan polisi dalam suatu operasi menjaga perdamaian memiliki peran untuk menjalankan *community policing* terhadap kelompok masyarakat sipil yang terdampak dalam konflik bersenjata.¹³ *Community policing* dalam operasi menjaga perdamaian biasanya dilakukan di saat lembaga kepolisian negara sedang lemah, rezim atau pemerintahan sedang mengalami kegagalan, dan dalam masa pemulihan pasca-konflik lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan saling mempercayai antara kepolisian dengan masyarakat, meningkatkan keamanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat. Akibatnya, mendirikan atau membangun kembali kepolisian negara kadang-kadang membutuhkan dukungan dari luar. Landasan kepercayaan merupakan komponen penting untuk menjalankan *community policing*. Untuk itu, keberhasilan dan kegagalan dari *community policing* yang dilakukan oleh pasukan perdamaian akan bergantung dari seberapa kuat hubungan yang dimiliki oleh personel yang bertugas dengan masyarakat sipil atau komunitas masyarakat sipil.¹⁴

Beth K. Greener dalam bukunya yang berjudul “**The New International Policing**” juga menjelaskan mengenai *community policing* yang tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi

¹³ Peter Grabosky, *Community Policing and Peacekeeping*, 1st ed. (Crc Press, 2019), 6.

¹⁴ *Ibid*, 7.

juga untuk menerapkan keadilan dalam komunitas masyarakat setempat.¹⁵ Kemampuan angkatan kepolisian dalam operasi menjaga perdamaian memiliki potensi untuk memperbaiki hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan bantuan untuk masyarakat sipil melalui *community policing* yang diberikan oleh angkatan kepolisian sebagai pasukan perdamaian.¹⁶ Angkatan kepolisian negara sebagai institusi nasional dapat membantu kelompok masyarakat sipil dan rezim dalam menjaga legitimasi pemerintahan yang kredibel serta membantu memberikan keadilan dan keamanan untuk masyarakat terdampak konflik.¹⁷

Di sisi lainnya, beberapa literatur berpendapat bahwa peran yang dimiliki oleh angkatan polisi sebagai pasukan perdamaian telah berevolusi seiring dengan perubahan zaman. Seperti pada literatur buku “**Police in UN Peacekeeping: Improving Selection, Recruitment, and Deployment**” yang ditulis oleh William J. Durch and Michelle Ker. Terdapat tiga kategori operasi yang akan menentukan peran yang dimiliki oleh angkatan polisi dalam suatu operasi PBB yaitu *Traditional Police Peacekeeping*, *Transformational Police Peacekeeping*, dan *Interim Law Enforcement*.¹⁸ Dalam *Traditional Police Peacekeeping*, angkatan kepolisian akan melakukan pengawasan terhadap perilaku penegak hukum dalam negeri serta melaporkan jika terdapat pelanggaran hak asasi manusia.¹⁹ Peran ini ditujukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan jaminan keamanan kepada kelompok yang telah mengalami kekerasan oleh pihak-pihak berkonflik.²⁰ Dari ketiga kategori ini, *Traditional Police Peacekeeping* merupakan kategori dimana PBB dan pasukan perdamaian tidak banyak ikut campur tangan dalam permasalahan negara berkonflik.

¹⁵ Beth Greener, *The New International Policing* (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009), 108.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ William J Durch and Michelle Ker, *Police in UN Peacekeeping* (International Peace institute , 2013), 4–6.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Dalam kategori kedua, *Transformational Police Peacekeeping*, angkatan kepolisian diberikan tiga tugas dalam operasi menjaga perdamaian yaitu *reforming*, *restructuring*, dan *rebuilding indigenous law enforcement capacity*.²¹ Tiga tugas ini ditujukan untuk institusi nasional negara berkonflik seperti kepolisian negara tersebut dan merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh pasukan perdamaian. *Reforming* bertujuan membantu polisi lokal untuk merubah cara pelaksanaan tugas untuk lebih mempromosikan dan menghargai HAM.²² *Restructuring* bermaksud untuk membangun kembali institusi keamanan negara agar menghilangkan unsur politik, pelanggar HAM, serta menggantikannya dengan penegak hukum lokal yang baru. Selain itu, pasukan perdamaian juga membentuk rantai otoritas yang lebih efektif dan bertanggung jawab dengan komunitas masyarakat.²³ *Rebuilding indigenous law enforcement capacity* berfokus pada efektivitas yang dimiliki oleh kepolisian lokal dalam melaksanakan tugasnya.²⁴

Kategori ketiga, yaitu *Interim Law Enforcement*, memberikan kuasa yang lebih kepada angkatan kepolisian dalam misi perdamaian. Pasukan perdamaian diberikan wewenang untuk menegakkan hukum serta membawa senjata pada operasi perdamaian.²⁵ Tujuan utama dalam operasi ini umumnya adalah untuk membantu institusi keamanan lokal dalam mengambil alih kembali wilayah yang sudah berada dalam konflik yang berat.

Selain itu, William J. Durch dalam jurnalnya “**United Nations Police Evolution, Present Capacity and Future Tasks**” juga memberikan argumen yang sama dimana angkatan kepolisian dalam pasukan perdamaian perlu berfokus dalam tiga peran pada pertengahan dekade ini. Peran-peran ini adalah melakukan *transformasional* yaitu memberikan bimbingan, pelatihan, dan

²¹ Ibid.

²² Ibid, 5.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid, 6.

reformasi, restrukturisasi dan pembangunan kembali layanan polisi pasca-konflik.²⁶ Lalu literatur juga menyebutkan mengenai pengawasan dan pelaporan yang sama dengan kategori *traditional police peacekeeping* serta *Interim Law Enforcement* yaitu memberikan dukungan operasional keamanan kepada polisi nasional dan badan-badan penegak hukum lainnya sebagai peran pasukan perdamaian.²⁷ Literatur juga menyampaikan bahwa dari tiga peran ini juga dapat dikelompokkan kembali menjadi peran pendukung institusional, yang berisikan pengawasan dan membantu memperbaiki struktur institusi keamanan negara, dan peran kontribusi langsung kepada keamanan publik.²⁸

Terlepas dari dua kelompok literatur di atas, penulis akan memposisikan penelitian dengan argumen tersendiri, yang menyatakan bahwa pengiriman angkatan Kepolisian Republik Indonesia untuk operasi MINUSCA dilatarbelakangi dengan pelatihan dan pengalaman yang dimiliki oleh angkatan kepolisian Indonesia. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain akan berada pada analisis kasus yang ditunjukkan. Kasus yang digunakan merupakan kasus Kepolisian Republik Indonesia dalam operasi MINUSCA, dengan melihat peran yang dimiliki angkatan kepolisian sebagai suatu alasan Indonesia mengirimkan personel penegak keamanan untuk operasi perdamaian MINUSCA.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan *Capability-Based Planning* (CBP). Menurut Paul Davis (RAND), *Capability-Based Planning* merupakan pendekatan perencanaan strategis yang dapat mendefinisikan kemampuan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menanggapi berbagai macam situasi kontinjensi. Kemampuan ini harus dapat

²⁶ William Dorch, "United Nations Police Evolution, Present Capacity and Future Tasks," Stimson.org (Stimson, January 28, 2010), <https://www.stimson.org/2010/police-building-united-nations-police-evolution-present-capacity-and-f/>.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid, 10.

menangani permasalahan secara efektif, tidak hanya dengan masalah yang ada pada saat ini, namun juga dengan sejumlah tantangan dan situasi yang potensial. CBP mencakup skenario ancaman dengan cakupan yang lebih luas, jika dibandingkan dengan *Threat-based planning*. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tanggapan terhadap tantangan dan ancaman dengan jangkauan yang lebih luas.²⁹ CBP lebih cenderung untuk memiliki fokus organisasi yang lebih sempit, seperti menggunakan kelebihan, kelemahan, dan peluang sebagai penentu atau poin utama dalam membuat suatu perencanaan strategis. Secara garis besar, *Capability-Based Planning* merupakan sebuah pendekatan perencanaan tingkat tinggi dalam organisasi yang kompleks untuk menghadapi lingkungan operasi yang belum stabil.³⁰

Penggunaan kapabilitas merupakan unsur utama untuk mendukung pendekatan ini terhadap permintaan yang luas. Terdapat beberapa alasan untuk menggunakan pemanfaatan kapabilitas dalam perencanaan strategis. Pertama, dengan menggunakan kapabilitas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan fungsional, perencanaan akan menjadi lebih fleksibel, mampu beradaptasi, dan ketangguhan serta interoperabilitas dapat menjadi tujuan utama dari pendekatan ini. Kedua, deskripsi fungsional berbasis kemampuan memungkinkan keterkaitan yang jelas antara strategi dengan tujuan misi dan persyaratan-persyaratan tingkat tinggi, tanpa mengidentifikasi atau menentukan penggunaan sumber daya tertentu sebelum waktunya. Keterkaitan yang jelas ini memfokuskan pada upaya perencanaan strategis pada pencapaian tujuan akhir. Dengan analisis ini, perencanaan dapat berkonsentrasi pada apa yang perlu

²⁹ Aaron C. Taliaferro et al., "Introduction to Capability-Based Planning (CBP) and Its Comparison to Threat-Based Planning," JSTOR (Institute for Defense Analyses, 2019), https://www.jstor.org/stable/resrep22853.4?searchText=&searchUri=&ab_segments=&searchKey=&refreqid=fastly-default%3Aa982369bf6269fddd1d64610ebce106d&seq=1.

³⁰ Leung Chim, Rick Nunes-Vaz, and Robert Prandolini, "Capability-Based Planning for Australia's National Security," *Security Challenges* 6, no. 3 (2010): 79–96, <https://www.jstor.org/stable/26459800>.

dilakukan oleh organisasi, dan bukan pada sumber daya apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.³¹

Capability-Based Planning dimulai dengan memetakan dan memahami kapabilitas yang tersedia pada suatu organisasi. Hal ini melibatkan mengidentifikasi dan mendokumentasi kompetensi yang tersedia, sumber daya, keterampilan, teknologi. Kemampuan yang tersedia dalam suatu organisasi perlu dikembangkan, ditingkatkan, atau diperoleh untuk memenuhi tantangan dan peluang yang terus berkembang. Untuk itu diperlukan penilaian kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dan kemampuan yang diinginkan, lalu mengimplementasikan strategi untuk mengembangkan atau memperoleh sumber daya, keterampilan, dan teknologi yang diperlukan.³²

CBP membantu dalam mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas kemampuan. CBP berfokus pada investasi sumber daya dalam membangun, meningkatkan, dan meningkatkan kemampuan penting yang selaras dengan tujuan strategis, dan tidak mengalokasikan sumber daya berdasarkan proyek atau kegiatan individu. CBP menyadari pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, CBP melibatkan penilaian dan penyesuaian kapabilitas secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan prioritas strategis dan kebutuhan yang terus berkembang.³³

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh CBP adalah, memiliki cakupan yang luas dalam melakukan perencanaan, sehingga hasil dalam perencanaan ini menjadi lebih fleksibel dengan

³¹ Ibid.

³² Aaron C. Taliaferro et al., "From Capability Planning to Actual Capability," JSTOR (Institute for Defense Analyses, 2019), https://www.jstor.org/stable/resrep22853.4?searchText=&searchUri=&ab_segments=&searchKey=&refreqid=fastly-default%3Aa982369bf6269fddd1d64610ebce106d&seq=1.

³³ Aaron C. Taliaferro et al., "A Structural Requirement of CBP Itself — the Capability Partition," JSTOR (Institute for Defense Analyses, 2019), https://www.jstor.org/stable/resrep22853.4?searchText=&searchUri=&ab_segments=&searchKey=&refreqid=fastly-default%3Aa982369bf6269fddd1d64610ebce106d&seq=1.

mementingkan berbagai macam aspek. CBP mendorong pentingnya membutuhkan penggunaan sistem dan konsep dari berbagai sumber untuk mencapai setiap kemampuan, serta menyediakan sarana untuk membandingkan berbagai opsi, untuk mencapai tujuan yang sama. Fokus bersama ini mendorong para pengambil keputusan untuk mendasarkan penilaian dalam tujuan pertahanan yang luas. Dengan demikian, sebuah pandangan holistik untuk perencanaan dapat diperoleh melalui CBP.³⁴

CBP dianggap sebagai metodologi yang terstruktur, transparan, dan fleksibel untuk menargetkan perencanaan yang memenuhi prioritas strategis, berdasarkan sasaran kinerja, pengeluaran, dan risiko. Proses ini mendorong pertimbangan sistematis atas ketidakpastian, menghadapi skenario yang akan terjadi, dan menghasilkan keputusan yang dapat ditinjau kembali dalam masa mendatang. Kualitas informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan dan pengembang kemampuan akan ditingkatkan oleh proses CBP.³⁵

Capability-Based Planning dapat diterapkan dalam konteks pengembangan kebijakan, untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif, penyesuaian strategis, dan pencapaian tujuan. Pembuat kebijakan perlu mendefinisikan dengan jelas tujuan kebijakan dan ruang lingkungannya. Identifikasikan tujuan atau hasil spesifik yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut, dan area organisasi atau masyarakat yang akan terkena dampaknya. Kemudian, lakukan penilaian komprehensif terhadap kemampuan yang tersedia dan relevan dengan tujuan kebijakan. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.³⁶

Penetapan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai keefektifan dan kemajuan implementasi kebijakan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan

³⁴ Leung Chim, Rick Nunes-Vaz, and Robert Prandolini, Loc. Cit

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

menetapkan indikator kinerja utama dan metode pengukuran untuk melacak pengembangan dan pemanfaatan kemampuan. Menerapkan *Capability-Based Planning* dalam pengembangan kebijakan, dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara strategis, kapabilitas dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan kebijakan diselaraskan dengan tujuan organisasi atau masyarakat yang lebih luas.³⁷

CBP juga dapat digunakan dalam konteks tugas polisi dalam operasi perdamaian PBB untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kemampuan penegakan hukum. Dengan penerapan ini, sumber daya kepolisian dapat dialokasikan secara strategis, kemampuan kepolisian dapat dikembangkan dengan efektif, dan upaya dapat diselaraskan dengan tujuan dari operasi perdamaian. Dengan pendekatan ini, angkatan kepolisian dalam operasi perdamaian dapat meningkatkan efektivitas operasional, keamanan masyarakat, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan terus berkembang.³⁸ Tugas operasional yang dilakukan dalam operasi perdamaian PBB dapat menjadi efektif dengan melakukan perencanaan, yang menetapkan penugasan sesuai dengan kapabilitas. Penetapan dapat disesuaikan dengan keahlian seperti menegakkan hukum, membangun kapasitas, dan menjaga masyarakat sipil dengan melakukan *community policing*.

Keefektifitasan dalam perencanaan, ditentukan dengan seorang individu yang memiliki keahlian untuk melakukan tugasnya dengan maksimal. Pemaksimalan dapat dicapai dengan kegiatan yang membantu individu tersebut dengan mengasah keahlian dalam suatu bidang tertentu. Mengasah kapabilitas melibatkan praktik yang disengaja, pembelajaran berkelanjutan, upaya yang ditargetkan untuk meningkatkan kinerja dalam domain tertentu dan pengalaman dari

³⁷ Ibid.

³⁸ Thomas-Durell Young, "Capabilities-Based Defense Planning: Techniques Applicable to NATO and Partnership for Peace Countries," *Connections: The Quarterly Journal* 05, no. 1 (2006): 35–54, <https://doi.org/10.11610/connections.05.1.04>.

kegiatan yang telah dilakukan. Kapabilitas bukan merupakan hasil dari bakat atau kemampuan bawaan, melainkan dikembangkan melalui latihan, pengalaman, dan pembelajaran yang berkelanjutan.³⁹

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan logika berfikir induktif untuk menggeneralisasikan hasil observasi dan temuan untuk menentukan teori yang tepat. Menurut Bryman induksi merupakan pemikiran alternatif, yang menghubungkan penelitian dengan teori yang prosesnya cenderung memerlukan sedikit deduksi.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari laporan dan dokumen yang dikeluarkan oleh badan pemerintahan dan organisasi internasional.⁴¹ Selain itu, penulis juga akan menggunakan sumber-sumber tambahan seperti menggunakan kembali data dan statistik terdahulu yang telah dipublikasikan, buku, artikel jurnal, serta berita terpercaya yang berkaitan dengan operasi MINUSCA dan angkatan kepolisian Republik Indonesia dalam MINUSCA. Analisis penelitian akan menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Bryman, analisis data kualitatif didukung oleh induksi analitik yang dimulai dengan mendefinisikan pertanyaan penelitian, yang dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis awal, disambung dengan melakukan pengumpulan data relevan sampai dengan data yang telah dikumpulkan sudah menjawab hipotesis.⁴²

1.7 Sistematika Pembahasan

Pada Bab I, penulis menjelaskan mengenai topik utama penelitian melalui pendahuluan yang berisikan latar belakang dan identifikasi permasalahan. Latar belakang berisikan operasi MINUSCA yang saat ini sedang berhadapan dengan konflik yang semakin hari, semakin

³⁹ Karl Anders Ericsson et al., *The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance* (Cambridge Cambridge University Press, 2018), 45–46.

⁴⁰ Alan Bryman, *Social Research Methods*, 4th ed. (2001; repr., Oxford: Oxford University Press, 2012), 26.

⁴¹ *Ibid*, hal 554.

⁴² *Ibid*, hal 567.

memburuk kondisinya. Dalam identifikasi masalah, menjelaskan mengenai Indonesia yang bergabung dalam operasi ini dan pasukan perdamaian yang dikirim bukan hanya angkatan militer saja, namun juga dengan angkatan polisi. Selain itu, Bab I juga berisikan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta Sistematika Pembahasan.

Pada Bab II, penulis membahas mengenai konflik yang sedang ditangani oleh operasi MINUSCA secara mendalam. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam pengiriman angkatan Kepolisian Republik Indonesia seperti Indonesia serta institusi keamanan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pasukan perdamaian dalam operasi MINUSCA dan kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian dalam operasi tersebut. Sebagai penunjang penjelasan mengenai angkatan kepolisian dalam operasi MINUSCA, penulis juga mencantumkan data dari jumlah anggota personel angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang telah dan sedang bertugas dalam operasi MINUSCA.

Bab III menganalisis peran yang dimiliki oleh angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam operasi perdamaian, sehingga menjadi alasan dari pengiriman angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam operasi perdamaian dan membuat Kepolisian Republik Indonesia tetap mengirimkan angkatan kepolisian sebagai pasukan perdamaian dalam masa konflik yang sangat berbahaya. Dalam bab ini, penulis melihat kasus operasi MINUSCA sebagai operasi perdamaian di mana Kepolisian Republik Indonesia juga dikirimkan ke dalam operasi tersebut. Dalam bab ini, penulis juga menganalisa peran angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pasukan perdamaian dalam operasi MINUSCA dengan konsep dan teori *community policing*.

Pada Bab IV, penulis menulis kesimpulan yang ada di dalam penelitian. Kesimpulan berisikan peran dan yang dimiliki oleh angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pasukan

perdamaian dalam operasi MINUSCA. Dari peran yang dimiliki ini sekaligus juga memaparkan alasan dari pengiriman angkatan Kepolisian Republik Indonesia untuk operasi MINUSCA yang dilakukan oleh Indonesia.